



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I
Tahun 2021



 bpom_semarang@pom.go.id

   @bpomsemarang

LAYANAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Informasi **081225694252** Sertifikasi **081227701941**

Pengujian **081326759688** Kantor **024-7612324**

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I terhadap target tahun 2021, evaluasi dan

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Target tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 menyesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada triwulan berikutnya berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk mencapai target kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2021.

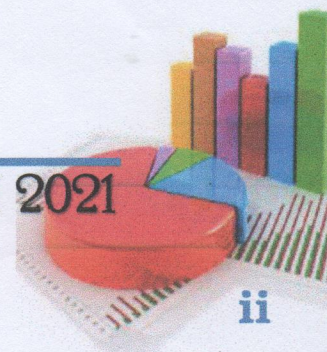
Semarang, 16 April 2021

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2021 berisi capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2021 yang diukur berdasarkan berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Renstra Badan POM 2021
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja diukur dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada Triwulan I Tahun 2021 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Enam Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No SS	Sasaran Strategis	% Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Semarang	103,75%	Baik
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM Semarang	79,12%	Cukup
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	64,56%	Kurang
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	129,44%	Tidak dapat disimpulkan
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	166,05%	Tidak dapat disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM Semarang secara Akuntabel	79,63%	Cukup

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 103,75% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2021

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 79,12% dengan kriteria “cukup”, menunjukkan BBPOM di Semarang cukup mampu dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 64,56% dengan kriteria “kurang”, BBPOM di Semarang belum maksimal dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang karena beberapa tahapan tertunda dengan adanya kegiatan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat).
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 129,44% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini menunjukkan penetapan target pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang terlalu rendah.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 166,05% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini menunjukkan penetapan target penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang terlalu rendah.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 79,63% dengan kriteria “cukup”, menunjukkan BBPOM di Semarang cukup mampu dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Persentase capaian target kinerja BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2021 antara 64,56% - 166,05%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang” yaitu 64,56%. Capaian ini belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan beberapa tahapan tertunda dengan adanya kegiatan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat).

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang” sebesar 166,05%. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu rendah dan perlu penyesuaian target Triwulan II 2021.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 52.306.317.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus enam juta tiga ratus ribu tujuh belas ribu rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan I tahun 2021 terealisasi sebesar Rp7.398.450.720,- (Tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau 14.14% belum mencapai target 15%, karena masih terdapat beberapa berkas keuangan yang masih proses verifikasi.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Isu Strategis.....	5
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	5
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis	6
1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2021.....	10
Bab II Perencanaan Kinerja.....	24
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	24
2.2 Perjanjian Kinerja 2021.....	24
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	26
2.4 Metode Pengukuran.....	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	31
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I.....	31
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I	33
3.2.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	33
3.2.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	39
3.2.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	41

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



3.2.4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	45
3.2.5.	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	52
3.2.6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	60
3.2.7.	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	63
3.2.8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	66
3.2.9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	69
3.2.10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.....	71
3.2.11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	73
3.3	Realisasi anggaran.....	77
Bab I	Penutup.....	80
4.1	Kesimpulan	80
4.2	Saran	81
Lampiran		82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang	4
Gambar 2 Profil Pegawai Tahun 2021	6
Gambar 3 Peta Provinsi Jawa Tengah	8
Gambar 4 Data Sarana Distribusi	9
Gambar 5 Data Sarana Produksi	9
Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)	30
Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1	33
Gambar 8 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4	46
Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5	53
Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6	60
Gambar 11 Grafik Capaian Indikator pada SK7	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Enam Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan I Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	iii
Tabel 2 Kebutuhan SDM BBPOM di Semarang berdasarkan ABK Tahun 2019	18
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang	24
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BBPOM di Semarang	26
Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2021	31
Tabel 6 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1	33
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan I 2021	34
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2021	35
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021	37
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021	38
Tabel 11 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2	39
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)	40
Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3	41
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021	42
Tabel 15 Rincian kegiatan sampai dengan Triwulan I 2021	43
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021	43
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2021	44
Tabel 18 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4	46
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil	47
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil	48
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	48
Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2021	50
Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2021	51
Tabel 24 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	51
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021 ..	52
Tabel 26 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5	52

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I 2021.....	53
Tabel 28 Intepretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE	54
Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I 2021.....	55
Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I2021	57
Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I 2021.....	59
Tabel 32 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6	60
Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I 2021	61
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standat Triwulan I 2021.....	62
Tabel 35 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7	63
Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan I 2021.....	65
Tabel 37 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8	66
Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang Triwulan I 2021	66
Tabel 39 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja.....	68
Tabel 40 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9	69
Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Triwulan I 2021	70
Tabel 42 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10	71
Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan I Tahun 2021	73
Tabel 44 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11	73
Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang.....	74
Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2021.....	75
Tabel 47 Realisasi Anggaran TW I	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja TW I Tahun 2021 BBPOM di Semarang



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang pada tahun 2021. Untuk menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Semarang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id



1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata



Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

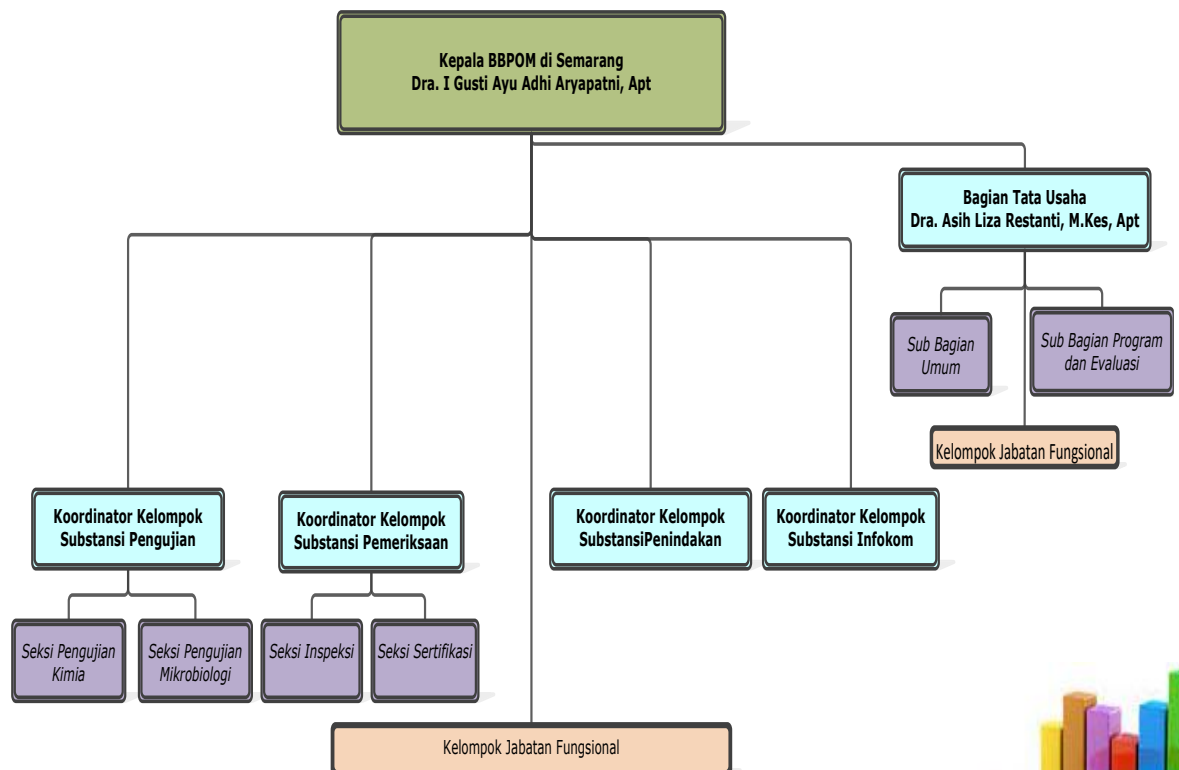


Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung instansi lain meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM sebagai koordinator melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai POM di kabupaten / kota.



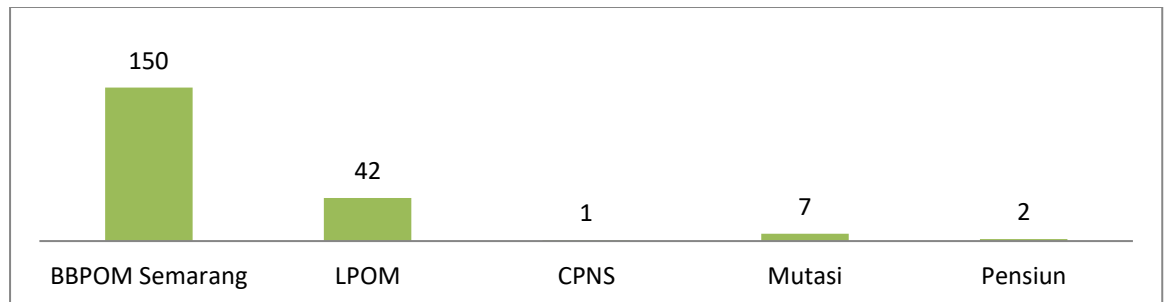
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2021 sebanyak 150 pegawai dengan penambahan dan pengurangan pegawai seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 2 Profil Pegawai Tahun 2021

Adapun 150 pegawai dimaksud terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	2
Pejabat Fungsional :		
2.	Pengawas Farmasi dan Makanan	118
3.	Arsiparis	3
4.	Analisis Kepegawaian	2
5.	Pranata Komputer	1
6.	Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1
7.	Analisis Anggaran	1
8.	Perencana	1
Jabatan Pelaksana :		
7.	Analisis Laboratorium	2
8	Asisten Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	1
9.	Analisis Barang Jasa	2
10.	Analisis Data dan Informasi	1
11.	Analisis Layanan Umum	1
12.	Analisis Laporan Keuangan	2
13.	Bendahara	1
14.	Pengelola Barang Milik Negara	2
15.	Pengadministrasi Keuangan	3
16.	Pengadministrasi Umum	4

17.	Pengemudi	1
18.	Caraka	1
TOTAL		150

Untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Semarang mempunyai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, terdiri dari:

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Tenaga Pengamanan	8
2	Cleaning Service	9
3	Pengemudi	4
4	Tenaga Administrasi	12
5	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1
6	Pengelola Gudang reagen	1
7	Sekretaris	1
9	Tenaga IT	2
9	Pemelihara Jaringan Listrik dan Air	1
TOTAL		39

b) Anggaran.

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2021 : Rp. 52.306.317.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2021 : Rp. 7.398.450.720,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 14,14 % dari alokasi anggaran Tahun 2021.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 sebesar : Rp. 417.201.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah seluruh propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.



A. Wilayah kerja BBPOM di Semarang ,

meliputi :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kota Semarang | 17 Kabupaten Pekalongan |
| 2. Kabupaten Grobogan | 18 Kabupaten Kudus |
| 3. Kabupaten Demak | 19 Kabupaten Blora |
| 4. Kabupaten Kebumen | 20 Kota Magelang |
| 5. Kabupaten Klaten | 21 Kota Pekalongan |
| 6. Kabupaten Pati | 22 Kota Salatiga |
| 7. Kabupaten Jepara | 23 Kabupaten Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 24 Kota Tegal |
| 9. Kabupaten Magelang | 25 Kabupaten Brebes |
| 10. Kabupaten Semarang | 26 Kabupaten Pemalang |
| 11. Kabupaten Batang | |
| 12. Kabupaten Boyolali | |
| 13. Kabupaten Purworejo | |
| 14. Kabupaten Temanggung | |
| 15. Kabupaten Rembang | |
| 16. Kabupaten Wonosobo | |

B. Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi :

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri



Gambar 3 Peta Provinsi Jawa Tengah

C. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi :

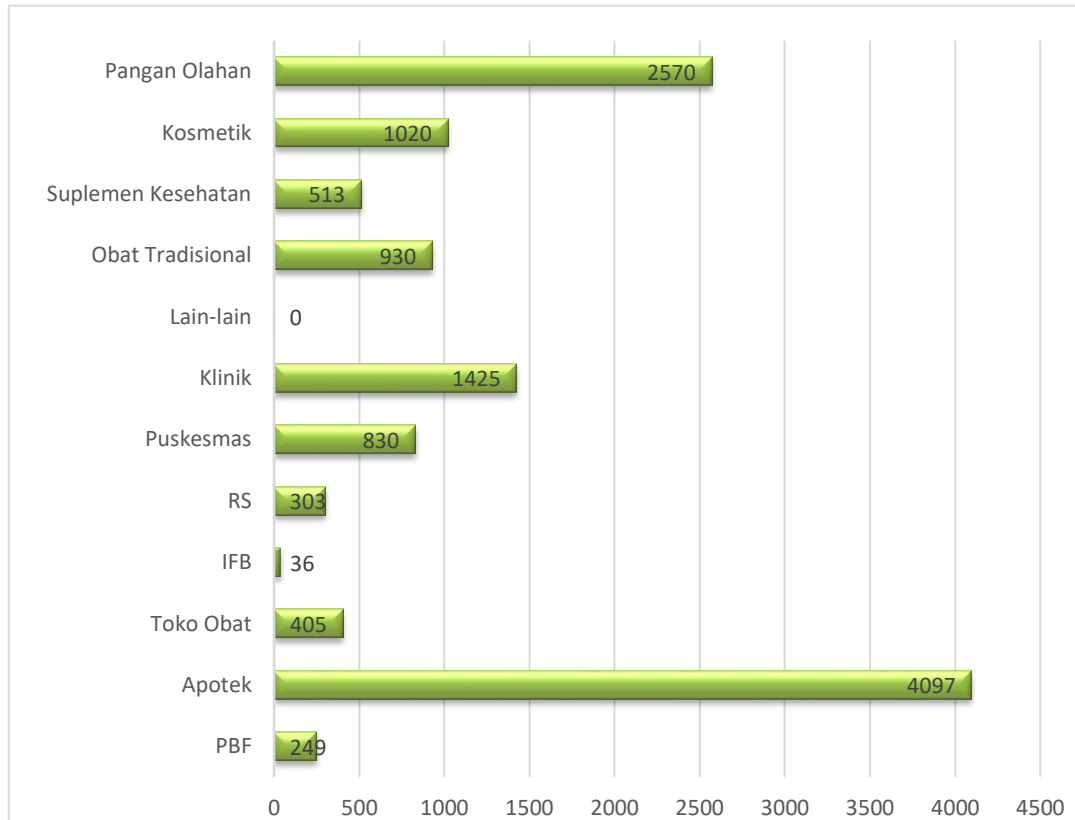
1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan

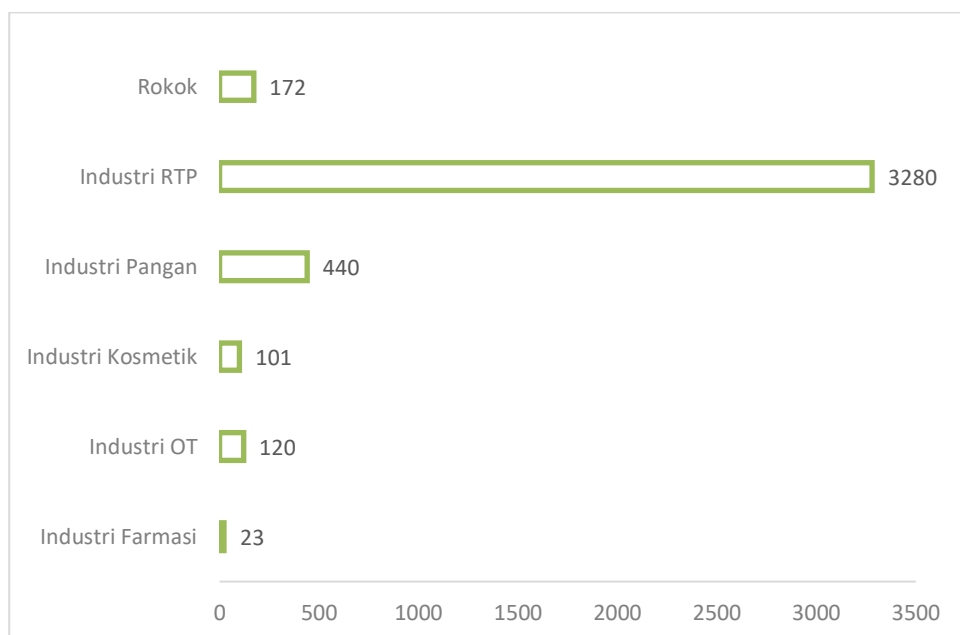
LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULANI 2021



bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.



Gambar 4 Data Sarana Distribusi



Gambar 5 Data Sarana Produksi

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2021

1.4.3.1 Isu eksternal yang memberikan peluang:

1. Lima prioritas kerja persiden 2020-2024:
 - a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
 - b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah;
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
 - c. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
 - Memangkas hambatan investasi.
 - d. Reformasi Birokrasi
 - Kecepatan melayani dan memberi izin;
 - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
 - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.
 - e. APBN yang fokus dan tepat sasaran
 - APBN dipatikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek2 kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Kementerian PAN RB mengawal.

2. Dukungan UMKM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang terus mendorong kepada para pelaku UMKM di Jawa Tengah, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.



Para pelaku UMKM yang ada di Jateng, akan terus didorong agar dapat mengurus dan memiliki izin edar dari produk pangan dan obat-obatan. BBPOM di Semarang membantu proses perizinan yang diajukan para pelaku UMKM dengan melibatkan dinas-dinas terkait, semakin banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya menjadi prasyarat dan tanggung jawab moral untuk menjamin produknya aman dan bermutu.

BBPOM di Semarang juga berupaya membantu masyarakat pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan bagi produknya, melalui BPOM Simpatik yakni memberikan konsultasi dalam pengurusan sertifikasi dan izin edar. Selain itu juga ada layanan Lakone Sekti juga dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

Dalam melakukan pembinaan tersebut BBPOM di Semarang tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari lintas pemangku kepentingan/Dinas-Dinas terkait sesuai amanat Inpres No.3/2017 dan Permendagri No.41/2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis.

3. Penegakan hukum Pengawasan Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat-obatan ilegal maupun tanpa izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka Balai Besar POM secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai premarket hingga postmarket.

Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang akan memperkuat pengawasan di lapangan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat. Bpom juga berkoordinasi dengan lintas sektoral di dalam bidang penegakan hukum, guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan.

4. Pengawasan produk JKN

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan



rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan pula instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Dilanjutkan dengan mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Badan POM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria Compliance untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. Adanya pengembangan kriteria akan disertai dengan dukungan pemerintah, “Badan POM berkomitmen untuk terus membuka dialog terkait Obat JKN, mendampingi jalannya riset dan pengembangan inovasi bioteknologi, membantu percepatan registrasi obat dengan penerapan reliance dan menghilangkan Approvable Letter yang sudah kami diskusikan, percepatan sertifikasi CPOB dan CDOB khususnya untuk di daerah terpencil”. (Penny Lukito, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15813/Perkuatan-Pengawasan-Obat-melalui-Sounding-Kriteria-Penilaian-Penyedia-Obat-JKN-.html>, 23 April 2019).

BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (*principal*), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

5. Pandemi Covid 19 di Jawa Tengah

Perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Tengah per harinya mengalami kenaikan yang signifikan. Data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus Covid-19 pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan sampai pada tanggal 11 Februari

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus Covid-19 di Jawa tengah telah mencapai 986 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan.

Dampak Pandemi Covid 19 di berbagai sektor:

a. Dampak Terhadap Sektor Perindustrian

Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi Covid-19. Bahkan, sebagai pembina industri, Kemenperin dinilai telah mengusulkan berbagai stimulus untuk kembali menggairahkan iklim usaha di Tanah Air.

Dengan adanya dukungan dari Kemenperin dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sektor industri farmasi dapat terus beroperasi dan memproduksi. Bahkan, kinerjanya mampu positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen.

Distribusi produk, khususnya ke daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat terus didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Pemberian IOMKI yang dilakukan Kemenperin merupakan langkah positif dan mampu membantu operasional sektor industri farmasi di tengah wabah Covid-19 sehingga dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam rangka penanganan Covid-19. Operasional di sektor farmasi juga tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. (Dorodjatun Sanusi, 2020).

Industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, serta industri alat kesehatan bertahan saat pandemik COVID-19 di Indonesia. Industri yang memiliki demand (permintaan) tinggi yang biasa memperkuat neraca perdagangan diantaranya industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, industri pelindung diri, alat kesehatan, etanol, masker dan sarung tangan. (Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Muhammad Khayam, republika.co.id, 5 mei 2020).

b. Perekonomian Jawa Tengah Menurun

Sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah mengidentifikasi 11 sektor mulai dari industri, pariwisata, hingga investasi yang terdampak covid-19. Sektor pariwisata misalnya terpukul karena adanya pembatalan maskapai penerbangan maupun pembatasan kunjungan bagi penumpang dari sejumlah negara.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mendata terjadinya penurunan volume ekspor perikanan sekitar 50%, terutama ke negara China pada periode Januari-Februari 2020 sebesar 34%. Dibandingkan Januari yang tercatat 1.060 ton bakal merosot menjadi 696 Ton pada bulan Februari. Ekonom Undip Wahyu Widodo mengatakan jika wabah covid-19 terus berlangsung sampai Mei 2020, maka ada kemungkinan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan terkoreksi. Jawa Tengah, telah menunjukkan kinerja yang baik, ketika pertumbuhan ekonomi nasional jatuh ke 5,02 persen pada 2019, Jateng justru tumbuh 5,41 persen. Kunci utamanya jangan terjadi panic buying. (www.solopos.com, 23 maret 2020).

c. Peluang dan Dampak Terhadap Sektor Pertanian atas Klaim Tanaman Obat Herbal

Tanaman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak laris manis diburu konsumen saat pandemi corona. Startup pertanian mencatatkan peningkatan permintaan tanaman herbal, begitu juga pendapatan petani. Penjualan tanaman herbal di secara online melonjak selama pandemi Covid-19. Konsumen memburu produk yang dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh, seperti empon-empon. Lonjakan permintaan utamanya terjadi ketika virus corona pertama kali muncul di Indonesia.

Dari melonjaknya permintaan tanaman herbal tersebut muncul klaim-klaim atas obat herbal yang diyakini bisa mencegah atau bahkan mengobati Covid-19. Apalagi Jawa Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan sentra empon-empon dan masyarakatnya sudah secara turun temurun mengkonsumsinya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, setidaknya ada empat poin utama penyebab maraknya bermunculan klaim obat Covid-19 di Tanah Air sehingga meresahkan masyarakat. Pertama, hal itu terjadi karena buruknya politik manajemen penanganan wabah oleh pemerintah sejak awal. Kedua, kurangnya literasi kepada masyarakat terkait produk obat-obatan selama pandemi terjadi. Ketiga yang mengakibatkan maraknya klaim obat bermunculan untuk penyembuhan Covid-19 berkaitan dengan aspek psikologis konsumen. Terakhir karena lemahnya atau kurang



optimalnya penanganan aspek hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Mayagustina Andarini menjelaskan obat untuk Covid-19 saat ini masih dilakukan penelitian dan uji klinis. Hal ini berarti, ketika ada obat yang beredar masih belum teruji keamanannya kepada manusia. Indonesia memang memiliki berbagai macam obat herbal dan ramuan empiris. Berbagai ramuan yang berupa jamu seperti beras kencur, temulawak, sambiloto dan kunir asem memang sudah terjamin kesehatannya karena telah dikonsumsi secara turun temurun.

Namun, akan sangat berbeda dengan obat Covid-19. Penyakit ini baru saja muncul pada awal 2020. Tentunya, ramuan dari nenek moyang masyarakat Indonesia tidak ada yang menjamin dapat menyembuhkan penyakit Covid-19.

Peran BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT Badan POM di masa pandemi ini sangat vital dalam pengawasan produk obat dan herbal di wilayah Jawa Tengah yang banyak diakui bisa mengatasi virus corona. BBPOM di Semarang. BBPOM di Semarang menjalankan fungsinya dalam membina dan mendampingi proses penelitian serta mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemahaman obat atau herbal tersebut sudah terdaftar secara spesifik dan memiliki indikasi untuk menyembuhkan korona atau tidak.

1.4.3.2 Isu internal yang memberikan kekuatan

a. Penambahan SDM CPNS yang ditempatkan di Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas

Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, saat ini BPOM RI didukung oleh 33 Balai Besar/Balai POM yang berkedudukan di seluruh ibukota provinsi. Kemudian pada 2018, BPOM RI membangun Loka POM di 40 kabupaten/kota di 30 provinsi sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga seluruh pelosok negeri.

Dengan terbentuknya Loka POM tidak lepas dari penambahan SDM CPNS yang berkualitas demi memperkuat Sistem Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



b. Pengelolaan Barang Bukti hasil penindakan (PerKaBadanPOM no 21 tahun 2017)

Karena Pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya. untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana maka disusunlah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 tahun 2017.

c. Pembentukan rintisan SAKA POM

Pembentukan Satuan Karya Pramuka (SAKA) POM di Jawa Tengah sangat strategis dalam sistem pengawasan semesta Obat dan Makanan, yang memberikan wadah kegiatan khusus dalam bidang pengawasan obat dan makanan, serta wahana dalam memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Diharapkan dengan adanya SAKA POM akan memperkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Tengah

d. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara *metode purposive targeted* dengan pendekatan analisis risikodan acak/random.

Untuk mendukung kekuatan peran Badan POM dalam pengawasan obat beredar, diperlukan kekuatan pengawasan post-market berbasis strategi yang lebih efisien dan efektif sebagai respon terhadap relaksasi pengawasan pre-market, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan mutu obat. Strategi sampling dan pengujian perlu direvitalisasi untuk memperluas cakupan pengawasan serta dapat menjaring lebih banyak produk tidak memenuhi syarat di peredaran. Metode sampling mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019 menjelaskan tentang strategi dan target sampling tahun 2019 serta beberapa kebijakan untuk mendukung pencapaian target sampling.

e. Rencana sertifikasi sistem mutu ISO QMS 9001:2015 di Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas.

Seperti diketahui, penerapan ISO 9001:2015 di Badan POM ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.223.05.19.1580 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 BPOM. Berdasarkan Keputusan tersebut, seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM wajib menerapkan QMS ISO 9001:2015.

Audit Surveilans ISO 9001:2015 diharapkan dapat mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam berbagai aspek, yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional terhadap entitas Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Selain itu, juga meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM.

Sejalan dengan hal tersebut kedepannya akan direncanakan sertifikasi sistem mutu ISO QMS 9001:2015 di Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas.

1.4.3.3 Isu internal yang memberikan kelemahan

a. Penurunan anggaran untuk kegiatan pengawasan 2019-2021

Mencermati Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif dalam Rencana Kerja Pemerintah Badan POM Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 8.65% dibandingkan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2019. Hal ini menekankan bahwa alokasi anggaran TA 2021 harus dialokasikan secara efektif dan efisien dalam mendukung arah kebijakan serta strategi Badan POM dan tidak menjadi halangan bagi BPOM untuk terus bergerak menciptakan inovasi dan mendorong berbagai program strategis yang berdampak besar bagi masyarakat dengan biaya yang lebih rendah.



b. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, terdapat kekurangan jumlah dan kompetensi SDM pengawas dan penguji

Adapun profil pegawai BBPOM di Semarang pada Bidang/Seksi dan Bagian Tata Usaha berdasarkan ABK sampai dengan September tahun 2019 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 Kebutuhan SDM BBPOM di Semarang berdasarkan ABK Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (Bazzeting)	GAP
1	Bidang Pengujian	83 orang	55 orang	28 orang
2	Bidang Pemeriksaan	81 orang	35 orang	46 orang
3	Bidang Penindakan	15 orang	13 orang	2 orang
4	Bidang Infokom	13 orang	12 orang	1 orang
5	Bidang Tata Usaha	58 orang	29 orang	29 orang
	Total	250 orang	144 orang	106 orang

Berdasarkan matrik tersebut BBPOM di Semarang masih membutuhkan 28 pegawai di bidang pengujian untuk memenuhi beban kinerja.

c. SIPT yang belum established

SIPT adalah aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. Sistem ini mengalami pengembangan setiap tahunnya mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Perubahan Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Badan POM pada tahun 2018, memberikan perubahan pada SIPT sehingga melahirkan SIPT versi 2.0. SIPT versi 2.0 memuat perubahan alur proses bisnis pelaporan di Balai Besar dan Balai POM termasuk alur baru pada pelaporan Loka POM. Penggunaan SIPT agar dapat dimaksimalkan sebagai forum komunikasi antara Pusat dan Balai sehingga dapat meminimalisir pelaporan secara manual serta mendukung pengawasan obat dan makanan. Namun sampai saat ini SIPT belum *established* secara maksimal.



2. Pengawasan Obat dan Makanan

a. Kosmetik Ilegal Dominasi Pasar

Kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya mendominasi temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di pasaran selama tahun 2019. Maraknya peredaran kosmetik ilegal itu karena ada celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan mengedarkan produk mereka secara daring dan masih tingginya permintaan masyarakat terhadap kosmetik murah. Banyaknya konsumen terhadap produk ilegal itu disebabkan adanya iklan-iklan yang menyesatkan sehingga masyarakat tertarik untuk membeli. Temuan terbaru Badan POM di Semarang dan Magelang. Hasil operasi penertiban obat dan makanan ilegal oleh Balai Besar POM Semarang, pada April-Juni 2019, ditemukan ratusan merek kosmetik ilegal yang tidak berizin edar dan kosmetik yang dipalsukan di Magelang serta Semarang dengan nilai keekonomian mencapai miliaran rupiah.

b. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

BBPOM di Semarang dalam pengawasannya masih menemukan pangan beredar yang tidak memenuhi persyaratan, hal ini antara lain disebabkan masyarakat belum tersosialisasi secara merata dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak produk pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, perlu diwaspadai peredaran makanan mengandung bahan berbahaya. Sebab, tingginya permintaan seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan. Biasanya dengan menurunkan kualitas pangan.

Peredaran bahan berbahaya pada makanan, harus terus diawasi oleh jejaring keamanan pangan yang terdiri dari Polda, BPOM, Disperindag, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas peternakan dan sejumlah pihak lainnya. Masyarakatpun harus menjadi konsumen pintar dan selalu waspada.

c. Sinergisme Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan Tim Koordinasi Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah



Sinergisme Tim Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan Tim Koordinasi Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Bulan Desember di Semarang. Pertemuan dihadiri oleh Biro Hukum Prov. Jateng, Dinas Kesehatan, Kab. Batang. Tim Satgas terbentuk berawal dari Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 dan keluar Keputusan Gubernur Jateng No. 440/123 tahun 2013.

Sementara ini tim satgas baru terbentuk di 12 Kabupaten /Kota, Tim Koordinasi di 2 kabupaten. Sedangkan Penganggaran tim Satgas dan Koordinasi berada di Kabupaten Batang. Keberadaan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Batang dapat dirasakan manfaatnya. Dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pangan aman dan kepatuhan produsen pangan.

3. Globalisasi dan Pasar Bebas Kawasan ASEAN (Menipisnya *Entry Barrier*)

Globalisasi perdagangan, menyebabkan *entry barrier* semakin tipis, oleh karena itu arus barang termasuk obat dan makanan dari dan ke berbagai negara menjadi semakin bebas, tanpa hambatan tarif maupun non tarif.

a. Penjualan Produk Obat dan Kosmetika Secara Online

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM.

b. Penyiapan Laboratorium Pengujian DNA

BBPOM di Semarang merupakan salah satu dari 7 BBPOM DI SEMARANG Badan POM yang telah memiliki alat pengujian DNA (*PCR Realtime*). Hal ini seiring dengan hasil pertemuan negara-negara Islam yang berkomitmen untuk menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di negara-negara anggota OKI.

4. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh BBPOM di Semarang dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

a. Kemitraan dengan UMKM

BBPOM di Semarang turut mengambil andil dalam mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dalam hal ini dengan meningkatkan kemampuan UMKM pangan sehingga mampu memproduksi pangan yang aman dan bermutu. BBPOM di Semarang juga mendorong kemandirian pelaku usaha melalui bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal.

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Masyarakat sebagai pengguna produk obat dan makanan diharapkan dapat melakukan pengawasan secara mandiri agar terlindungi dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Untuk mencapai hal ini, Balai Besar POM Semarang melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

c. Pemberdayaan keamanan pangan melalui “Panggul Sekzi” (Pangan Unggulan Aman, Sehat dan Bergizi)

Perkembangan produk industri pangan olahan mengalami peningkatan yang pesat dan menjanjikan, namun perkembangan pasar produk olahan tersebut tidak diikuti dengan jaminan aspek keamanan pangan karena sering kali lebih mementingkan aspek keuntungan. Oleh karena itu Pemerintah ingin mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan intensif melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA). Diharapkan dengan Germas SAPA ini semua pihak dapat bergotong-royong mewujudkan masyarakat sadar pangan aman, yang dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya promotif preventif dari hulu sampai ke hilir atau dari hilir ke hulu dan semua itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Gerakan ini diwujudkan oleh BBPOM di Semarang dengan mengusung jargon **Panggul Sekzi (Pangan Unggulan Aman, Sehat dan**



Bergizi) melakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah, dan masyarakat tentunya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah provinsi Jawa Tengah, serta menjalin kerjasama dengan Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Komitmen Pelaksanaan Refomasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM Semarang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Balai Besar POM Semarang berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM Semarang meningkat.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM Semarang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai Besar POM Semarang tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

6. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Industri farmasi berusaha memenuhi kenaikan permintaan obat dengan cara melakukan pengembangan fasilitas produksi dan peningkatan kapasitas produksi. BBPOM di Semarang melakukan fungsi staregisnya dengan :

- Peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB.
- Peningkatan pengawasan post-market melalui inspeksi pemenuhan CPOB di

sarana produksi obat secara berkesinambungan.

- Sampling terhadap obat program JKN serta pengujian di laboratorium dalam rangka memantau mutu obat yang diproduksi.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BBPOM di Semarang .
- Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.
- Peningkatan kemandirian pelaku usaha di Bidang Farmasi

BBPOM di Semarang Bersama Badan POM melakukan verifikasi *self assessment* oleh pelaku usaha.

7. Sertifikasi Sarana Pengolahan Produk Darah

BBPOM di Semarang melakukan audit pada sarana pengolahan produk darah. Pengolahan produk darah dilakukan oleh PMI (Palang Merah Indonesia). Produk darah yang diolah dan didistribusikan oleh PMI harus memenuhi syarat keamanan dan mutu. Audit dilaksanakan terhadap sarana pengolahan darah dengan berpedoman pada persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).



Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2021 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2021 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2021 yang telah disahkan.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	85.5

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	pengawasan Obat dan Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Semarang		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	92
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94.5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	Efisien (91%)

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2021 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang	80	80	80	80	Rp 216.286.333,-

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	BBPOM di Semarang	memenuhi syarat					
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2	89.2	89.2	89.2	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	Rp 216.286.333,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	Rp 6.105.000.000,-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,5	Rp 126.810.000,-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	Rp 24.240.000,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	89.5	Rp 301.955.000,-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	Rp 353.579.000,-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7	80.7	80.7	80.7	Rp 353.579.000,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	Rp 395.186.000,-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	Rp 484.600.000,-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	Rp1.201.364.000,-
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	4.15	Rp. 301.955.000,-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90	90	90	Rp 169.000.000,-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35%	55%	65%	41	Rp 583.187.000,-
		Jumlah desa pangan aman	35%	50%	85%	19	Rp 1.043.468.000,-
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	50%	70%	10	Rp 337.556.000,-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	75	92.5	Rp 438.780.334,-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	80	90.5	Rp 216.286.334,-
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	72.5	Rp 1.215.855.000,-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	-	-	-	92	Rp 35.265.000,-
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	-	-	85	Rp 25.000.000,-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	-	-	82	Rp 788.115.000,-

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
10	Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	77	Rp 8.855.728.000,-
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2	2	2	2	Rp 6.280.000,-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	50	65	75	94.5	Rp26.636.603.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Rp 996.792.000,-

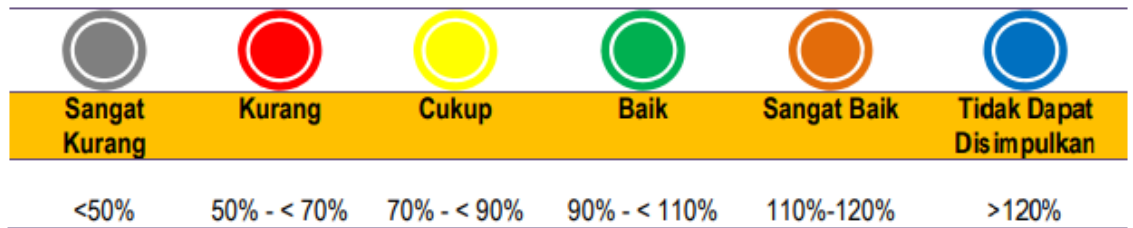
2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.





Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input(dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan I

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW I Tahun 2021 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2021. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) Triwulan I tahun 2021 sebesar 83,60% (CUKUP).

Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	93,11%	102,89%	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	96,64%	120,80%	Tidak dapat disimpulkan
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	74,14%	83,11%	Cukup
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	82,22%	108,19%	Baik
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100,00%	112,36%	Sangat Baik
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	9,62%	11,91%	Sangat kurang
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	82,05%	86,37%	Cukup
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	36,36%	71,29%	Cukup
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	64,80%	113,68%	Sangat Baik

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

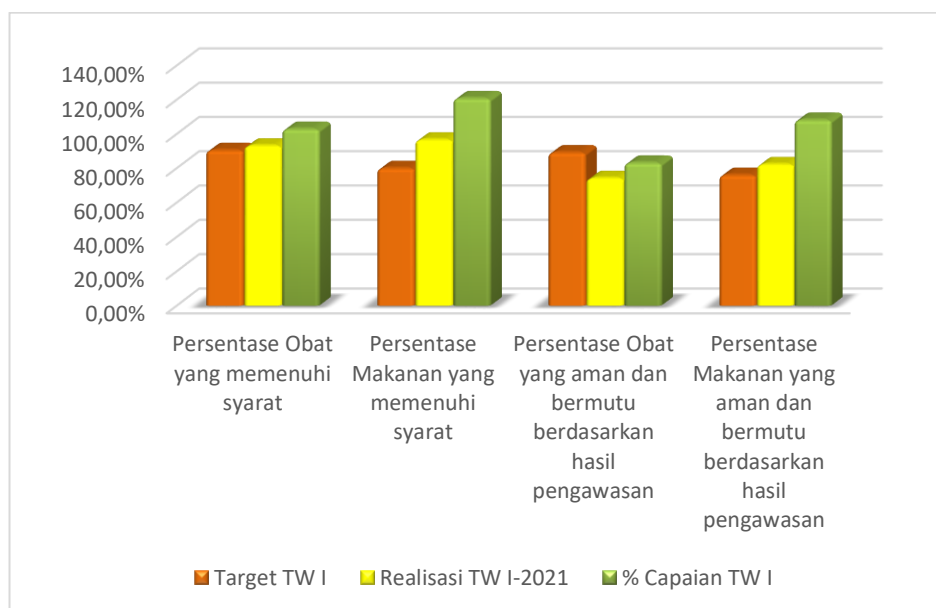
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,00%		0,00%	
		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35,00%	19,27%	55,06%	Kurang
		3	Jumlah desa pangan aman	35,00%	21,50%	61,43%	Kurang
		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00%	19,30%	77,20%	Cukup
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00%	22,28%	148,53%	Tidak dapat disimpulkan
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	22,07%	110,35%	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	33,21%	166,05%	Tidak dapat disimpulkan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2	0	0	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	50	38,42	77%	Cukup
		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91%	75%	82%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						83,60%	Cukup

3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 6 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	93,11%	102,89%	Baik
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	96,64%	120,80%	Tidak dapat disimpulkan
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	74,14%	83,11%	Cukup
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	82,22%	108,19%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1					103,75%	Baik



Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan I 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat 93,11% jika dibandingkan dengan target 90,50%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 102,89 (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	284	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	305	93,11%	102,89%	Baik

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “persentase obat yang memenuhi syarat”, disebabkan oleh:

1. Pembinaan kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal. Selama masa pandemi covid 19 pembinaan ke sarana distribusi tetap dilakukan menggunakan metode daring.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan



- Menyelenggarakan pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Melaksanakan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Mengintensifkan pemeriksaan sarana dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat.
- Meningkatkan kemampuan Laboratorium dalam pengujian produk suplemen kesehatan.

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan I 2021 realisasi makanan yang memenuhi syarat 96,64% jika dibandingkan dengan target 80%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 120,80% (kategori Tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	115	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	119	96,64%	120,80%	Tidak dapat disimpulkan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “persentase makanan yang memenuhi syarat”, disebabkan oleh:

1. Pembinaan kepada sarana distribusi makanan dalam mengimplementasi Cara Distribusi Makanan dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal. Selama masa pandemi covid 19 pembinaan ke sarana distribusi tetap dilakukan menggunakan metode daring.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi pangan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
3. Menyelenggarakan pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
4. Melaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan Triwulan I 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah 74,14% jika dibandingkan dengan target 89,20%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 83,11% (kategori cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	43	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	58	74,14%	83,11%	Cukup

Pada TW I ini capaian persentase Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari data perincian penyusunnya, berikut adalah urutan persentase sampel yang aman dan bermutu yaitu Obat tradisional 81,48%, Obat 75,00%, Suplemen Kesehatan 100,00% dan kosmetika 36,36%.

Sampling targeted adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kajian resiko dan produk yang memiliki *track record* tidak memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk memonitor tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh produsen.

Dari capaian yang belum memenuhi target, dapat disimpulkan bahwa produsen Obat tradisional belum melakukan tindakan perbaikan terhadap produknya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah agar produk Obat Tradisional yang diawasi dapat meningkat kualitasnya, yaitu dengan:

1. Mengintensifkan pembinaan kepada produsen, agar menerapkan CPOTB
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Sampai dengan Triwulan I 2021 realisasi makanan yang aman dan bermutu adalah 82,22% jika dibandingkan dengan target 76%, maka capaian sampai dengan TW I

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



adalah 108,19% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n	37	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	45	82,22%	108,19%	Baik

Perhitungan indikator ini berdasarkan hasil uji sampel yang disampling *targeted/purposive*. Sampel *targeted/purposive* yang dimaksud terdiri dari adalah minyak goreng, PJAS, tepung terigu, garam beryodium, dan sampel pendampingan UMKM.

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan oleh:

1. Menyelenggarakan pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi pangan UMKM P-IRT untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
3. Pembinaan kepada sarana distribusi makanan dalam mengimplementasi Cara Distribusi Makanan dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal. Selama masa pandemi covid 19 pembinaan ke sarana distribusi tetap dilakukan menggunakan metode daring.
4. Melaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan

3.2.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 11 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2				0,00%	

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana perilaku dan sikap dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang, sehingga nilai capaian baru muncul di akhir tahun (TW IV).

Untuk pencapaian sesuai target, berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara langsung maupun melali media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
2. Membuat materi-materi KIE di media sosial (instagram, facebook, twitter) tentang cek KLIK dan perilaku yang benar dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan.
3. Membuat alat peraga dalam bentuk poster, leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Menyisipkan informasi cek KLIK di semua materi presentasi yang ditujukan kepada masyarakat, agar dapat dipahami dengan lebih baik.

*Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*)*

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi		Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang	Penyebut			

5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-
---	---	---	-------------------------	---	---	---	---	---

3.2.3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM Semarang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0		0,00%	
	7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0		0,00%	
	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3					0,00%	

IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Pada Target Indikator ‘Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan’ dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar/workshop/pelatihan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD).

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini:

- 1) Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3) Aspek penanganan saran dan masukan
- 4) Aspek manfaat
- 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
- 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman

Pada Triwulan I

tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun berdasarkan hasil evaluasi sementara oleh PRKOM per Maret 2021, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kinerja BBPOM di Semarang sebesar 96,05 dengan melibatkan 37 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan 85,5.

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-	

Rincian kegiatan sampai dengan Triwulan I 2021 sebagai berikut:



Tabel 15 Rincian kegiatan sampai dengan Triwulan I 2021

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Responden	Nilai Event
					(kegiatan)
1	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Kiat UMKM Pengolah Pangan Menuju MD	2021-03-23 s.d 2021-03-23	BBPOM di Semarang	31	94,42
	Komoditi : Pangan Olahan				
	Unit Kerja Penyelenggara : BBPOM di Semarang				
2	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP	2021-01-04 s.d 2021-12-31	BBPOM di Semarang	3	98,11
	Komoditi : Pangan Olahan				
	Unit Kerja Penyelenggara : BBPOM di Semarang				
3	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik	2021-01-04 s.d 2021-12-31	BBPOM di Semarang	2	91,67
	Komoditi : Kosmetik				
	Unit Kerja Penyelenggara : BBPOM di Semarang				
4	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional	2021-01-04 s.d 2021-12-31	BBPOM di Semarang	1	100
	Komoditi : Obat Tradisional				
	Unit Kerja Penyelenggara : BBPOM di Semarang				
RATA-RATA NILAI EVENT					96,05

IKK.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
----	-------------------	-------------	-----------	---------------------	----------------	----------

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

			Pembilang		Penyebut				
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-	

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

IIKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2021 belum dikeluarkan nilainya oleh Inspektorat. Namun berdasarkan evaluasi dari Aplikasi Simolekdesi untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM Semarang memperoleh nilai Indeks 92,50 per 19 April 2021, yang terdiri dari:

1. Layanan Pengujian : dengan total 9 responden memperoleh indeks 95,34
2. Layanan SKI/SKE : dengan total 30 responden memperoleh indeks 90,70
3. Layanan Informasi dan Pengaduan : dengan total 144 responden memperoleh indeks 92,52

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi		Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang	Penyebut			

8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

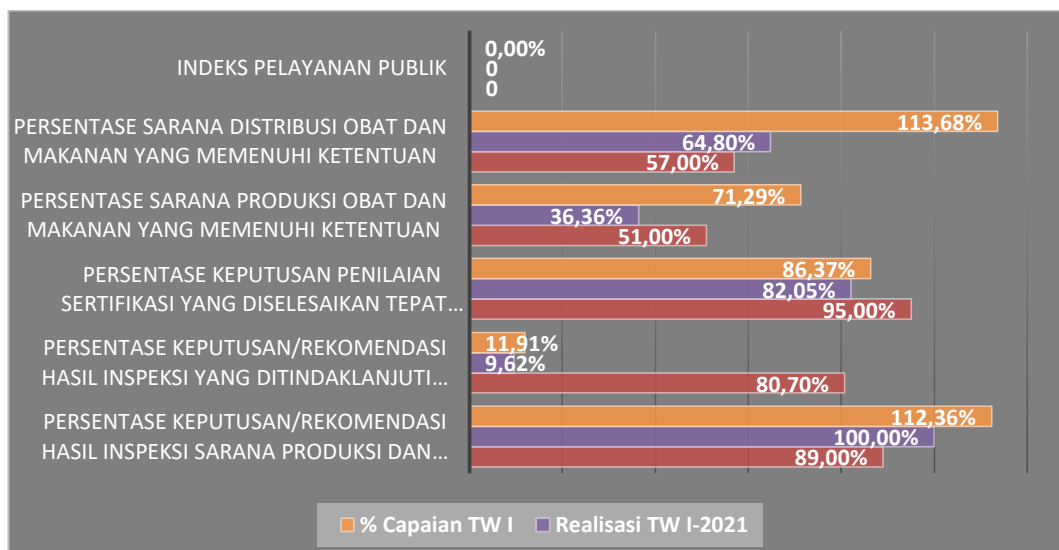
- a. Keberhasilan pencapaian IKM disebabkan oleh
 - Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan.
 - Fasilitas pelayanan publik yang memadai
 - Materi pendukung yang telah tersedia dalam bentuk leaflet, banner, poster, dokumen elektronik lainnya.
 - Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)
- b. Hambatan pelaksanaan program diantaranya :
 - Kompetensi narasumber yang beragam
 - Perubahan kebijakan dan peraturan yang dinamis sehingga harus dilakukan penyesuaian materi secara cepat dan tepat
 - Kesulitan pencarian responden karena banyaknya survey yang dilakukan baik oleh Badan POM maupun oleh Balai di daerah, sehingga beberapa responden keberatan untuk mengisi kuesioner.
- c. Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:
 - Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sosialisasi, seminar.
 - *Up-date* peraturan dan kebijakan tidak tertulis dari Badan POM.
 - Memperluas cangkupan responden, dengan memasukan responden baru penerima layanan atau informasi ditambah dengan lintas sektor terkait.

3.2.4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang



Tabel 18 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM Semarang	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100,00%	112,36%	Sangat Baik
	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	9,62%	11,91%	Sangat kurang
	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	82,05%	86,37%	Cukup
	12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	36,36%	71,29%	Cukup
	13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	64,80%	113,68%	Sangat Baik
	14 Indeks Pelayanan Publik	0	0	0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4				79,12%	Cukup



Gambar 8 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I, mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 89%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 112,36% (kategori sangat baik).

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00 %	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s,d triwulan	7	7	100,00 %	112,36 %	Sangat Baik

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM dan lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan obat makanan. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini memperkuat monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan baik tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan POM, BBPOM DI SEMARANG Badan POM dan Lintas sektor perlu strategi khusus dan komitmen untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian indikator ini juga menunjukkan bahwa Pengawasan obat dan makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melindungi masyarakat.

IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Capaian IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan I, mencapai 11,91% dengan kategori sangat kurang, terhadap dari target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 80,70%.

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70 %	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d triwulan n	5		52	9,62%	11,91 %	Sangat kurang

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sangat penting agar rekomendasi segera ditindak lanjuti.

Perlu strategi khusus dan komitmen untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan obat dan makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melindungi masyarakat.

IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada Triwulan I Tahun 2021, jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 64 dari 78 jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Dari data capaian kinerja terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2021 menunjukkan capaian sebesar 86,37% (kriteria cukup).

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Trwiualan I Tahun 2021

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d triwulan n	64	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d triwulan n	78	82,05%	86,37%	Cukup

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Correctle Action Preventle Action*) serta pelayanan konsultasi online maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha.
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa : bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya.
- Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081326248821

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai



- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara daring)

IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan I, mencapai 71,29% dengan kategori Baik, terhadap target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 51%.

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s,d triwulan n	32	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n	88	36,36%	71,29%	Cukup

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek dan dengan sistem pembobotan yang menjadi dasar keputusan untuk dilakukan pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana usaha industri obat tradisional, sarana pangan MD, sarana usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan sarana industri rumah tangga (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* pada proses produksi.

Koordinasi dan kerja sama kegiatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota selaku pembina pelaku usaha PIRT sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan capaian pada indikator ini.

IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan I, mencapai realisasi 64,80% dari target yang ditetapkan sebesar 57%, sehingga capaian kinerja sebesar 113,68% dengan kategori sangat baik.

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s,d triwulan n	127	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s,d triwulan n	196	64,80%	113,68%	Sangat Baik

IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana Prasarana (15%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW I dengan kategori nilai:

Tabel 24 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
-------------	----------	-------

0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Indeks Pelayanan Publik’, sehingga nilai capaian baru muncul di akhir tahun (TW IV).

Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021

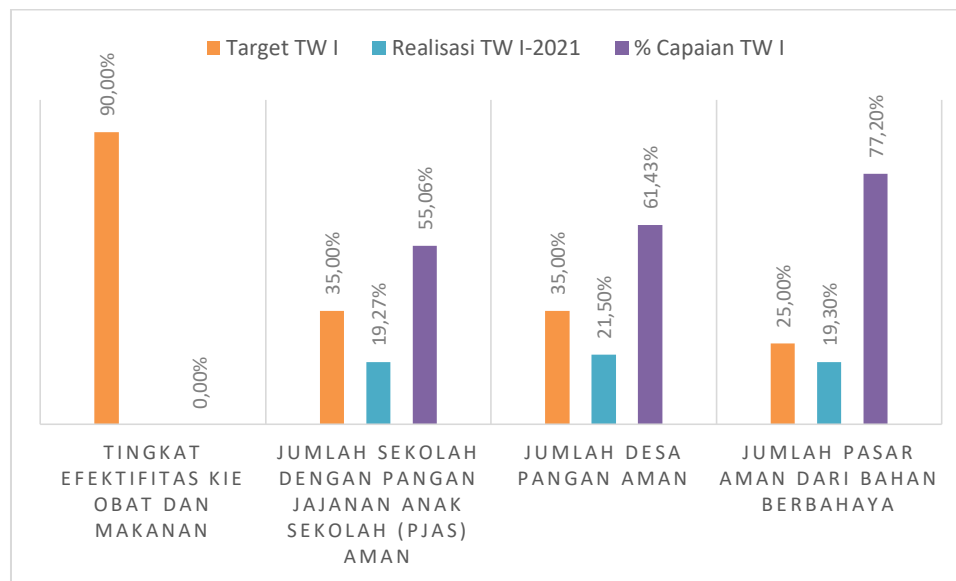
No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang	-	Penyebut	-			
14	Indeks Pelayanan Publik	-	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-		-	-	-	

3.2.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 26 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00%		0,00%	
	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35,00%	19,27%	55,06%	Kurang
	17	Jumlah desa pangan aman	35,00%	21,50%	61,43%	Kurang
	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00%	19,30%	77,20%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5					64,56%	Kurang





Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang	Penyebut				
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00%	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP				0,00%	

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Tabel 28 Interpretasi Nilai Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 - 100	Sangat efektif sekali

Untuk TW I, nilai tingkat efektifitas KIE di BBPOM di Semarang sedang dihitung oleh Biro HDSP Badan POM dengan link survey yang disebarkan kepada responden, jadi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan belum dapat dijelaskan pada Laporan Kinerja TW I ini.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indeks adalah:

- Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkini dari berbagai macam strata pendidikan dan usia Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.
- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Keterbatasan jumlah narasumber, yang tidak sebanding dengan permintaan KIE dari masyarakat.
- Tidak semua peserta KIE bersedia mengisi form survey.
- Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi millennial



Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Pembentukan Tim Narasumber yang berisi personil dari berbagai bidang yang memiliki kompetensi sebagai narasumber
- Memberi pengertian kepada responden diikuti dengan pemberian penjelasan langkah-langkah pengisian survey, agar tidak terjadi kebingungan dalam pengisian.
- Memperluas jangkauan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non millennial.

IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%			19,27%	55,06%	Kurang

Target tahun 2021 adalah sebesar 41 (empat puluh satu) sekolah. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru, pengelola kantin dan siswa. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi PJAS

Advokasi PJAS bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. Pemetaan Kantin Sekolah

Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai *agent of change* implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya.

5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah.

Monitoring dilakukan dengan kunjungan petugas BBPOM di Semarang ke sekolah yang telah mengikuti Bimtek dan Pelatihan dengan tujuan untuk mengetahui apakah telah dilakukan pembentukan Tima Keamanan Pangan sekolah dan adanya intervensi keamanan pangan oleh kader kepada komunitas sekolah. Selain itu juga dilakukan penilaian untuk mengetahui apakah sekolah tersebut telah layak untuk mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman level 1.

Dengan adanya pandemic Covid maka kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah ditiadakan, oleh karena itu Badan POM melakukan perbaikan terkait petunjuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa tahapan telah mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi operasional sekolah. Kegiatan sekolah PJAS aman merupakan kegiatan yang

berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di triwulan I. Pada triwulan I, telah dilakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Sekolah dan Pelatihan PBKPKS dan terealisasi sebesar 19,27%.

IKK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
17	Jumlah desa pangan aman	35,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%			21,50%	61,43%	Kurang

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting. Target jumlah desa tahun 2021 sebanyak 19 desa.

Keberhasilan program ini dapat diukur dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri baik dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah desa pangan aman' dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor
Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah.
2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa
Pelatihan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarluaskan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Untuk masing-masing dibentuk 15 kader yang terdiri dari 5 kader dari ibu PKK, 5 kader dari karang taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi
3. Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan

Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari 50 komunitas yang merupakan perwakilan dari ibu PKK, pelaku usaha ritel, pelaku usaha IRTP, pedagang kreatif lapangan, komunitas sekolah dan komunitas remaja. Bersamaan dengan kegiatan bimtek, juga dilakukan sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam kegiatan intensifikasi keamanan pangan desa.

4. Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan.

6. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan.

7. Lomba Desa

Dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian award atau penghargaan

Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di triwulan IV. Pada Triwulan I telah dilakukan tahap Advokasi dan pengawasan di masing-masing desa, dengan prosentase capaian kumulatif dari seluruh kegiatan sebesar 21,50%.

Adanya pandemic covid menyebabkan kegiatan Desa Pangan Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang dan pendampingan dari petugas BBPOM di Semarang yang lebih banyak, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan.

IKK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



*Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
Triwulan I 2021*

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%			19,30%	77,20%	Cukup

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Kriteria Pasar Aman meliputi:

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya’ dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Lintas Sektor
Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor /pemangku kepentingan di daerah
2. Survey Pasar
Survey dan identifikasi kondisi pasar, dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dibantu pengelola pasar
3. Pelatihan Petugas/Fasilitator Pasar
Pelatihan terhadap petugas/fasilitator pasar agar dapat mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, dapat melakukan pengambilan sampel, dan dapat melakukan pengujian dengan menggunakan rapid tes kit uji bahan berbahaya (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin B).
4. Monitoring dan Evaluasi tahap I



Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan oleh petugas pasar dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Hasil uji diinformasikan kepada pedagang sekaligus dilakukan pembinaan

5. Penyuluhan pedagang pasar

Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kepada pedagang pasar tentang Bahan Berbahaya dalam Pangan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang.

6. Kampanye Pasar

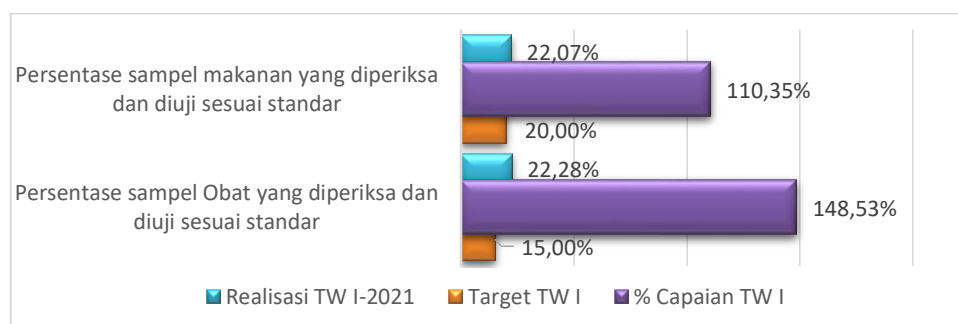
Kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dalam bentuk pameran, pemberian leaflet/brosur, informasi melalui radio pasar.

Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di triwulan IV. Pada Triwulan I telah dilakukan tahap Advokasi dan survei pasar, dengan prosentase capaian kumulatif dari seluruh kegiatan sebesar 19,30%.

3.2.6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 32 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00%	22,28%	148,53%	Tidak dapat disimpulkan
	20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	22,07%	110,35%	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6				129,44%	Tidak dapat disimpulkan



Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6

IKK.6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan I 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 22,28% jika dibandingkan dengan target 15%, maka capaian sampai dengan Triwulan I adalah 148,53% (kategori tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang	Penyebut				
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00%	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s,d triwulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s,d tahun n		22,28%	148,53%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun .
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya.

Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan Triwulan I ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standart kurang dari target yang ditetapkan, capaian tersebut menggambarkan bahwa produk dipasar yang beredar dapat menggambarkan bahwa terdapat beberapa yang tidak memenuhi ketentuan.

IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan I 2021 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 22,07% jika dibandingkan dengan target 20%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 110,35% (kategori sangat baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standart Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s,d triwulan n		(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s,d tahun n	22,07%	110,35%	Sangat Baik

Pada sampel obat, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji sesuai staandard dengan jumlah target sampel setahun .



c) Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representative* terhadap peredaran produk obat yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposive/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposive/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada Triwulan I ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam nilai baik, memenuhi target yang ditetapkan keberhasilan ini antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak dalam menepati ketentuan dan standar yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan.

3.2.7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 35 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	33,21%	166,05%	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7					166,05%	Tidak dapat disimpulkan

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Gambar 11 Grafik Capaian Indikator pada SK7

IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan

dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
(Jumlah

capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan

seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelarkasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangkadan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada Triwulan I tahun 2021, realisasi perkara SPDP sebanyak 4 perkara, P21 sebanyak 4 perkara, dan tahap 2 sebanyak 3 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 166,05% dan mendapat kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,			33,21%	166,05%	Tidak dapat disimpulkan

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan’ disebabkan oleh :

- Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jawa Tengah semakin baik.
- Koordinasi pihak kejaksaan yang semakin baik, sehingga banyak perkara yang menjadi P-21



3. Tersangka kooperatif sehingga tahap II dapat dilaksanakan dengan baik.

3.2.8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 37 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM Semarang yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Semarang	0		0,00%	
	23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8					0,00%	

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB. Pada Triwulan I tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang	Penyebut				
22	Indeks RB BBPOM di Semarang	-	Hasil indeks RB dari Ittama			-	-	
23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	Hasil nilai AKIP dari Ittama			-	-	

IKK.8.1 Hasil Indeks RB BBPOM di Semarang

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.
- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

IKK.8.1 Hasil Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Pada Triwulan I tahun 2021 Nilai AKIP teralisasi 77,49 dengan capaian 95,67% capaian ini lebih baik dibandingkan Tahun 2019. Namun belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan penerapan manajemen kinerja BBPOM di Semarang masih kurang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) I analisis hasil pengukuran kinerja.
- Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal dilakukan rliu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian target dan keandalan data.

Tabel 39 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 – 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 – 70	B	Baik
>50 – 60	CC	Cukup Baik
>30 – 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Pada Triwulan Itahun 2021 BBPOM di Semarang belum ada realisasi untuk indikator ini.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja diatas adalah:

1. Membuat perencanaan yang lebih baik
2. Melakukan review terhadap target secara berkala
3. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala

3.2.9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 40 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya SDM BBPOM Semarang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9					0,00%	

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'. Pada Triwulan I tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Triwulan I 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisasi TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-			-	-	

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

- Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian



3.2.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 42 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0		0,00%	
	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2		0	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10					0,00%	

IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN). Pada tahun 2021 ini assesmen direncanakan pada TW IV, sehingga sampai dengan TW I ini belum dapat disampaikan hasil capaiannya.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER

Diperoleh dari data kasus keracunan yang dIerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.

b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)

Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.

2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM

a. Jumlah upload berita actual setiap bulan

Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.

b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.

Penyebab belum tercapainya target:

a. SIPT belum berjalan maksimal, masih banyak kendala dengan penggunaan aplikasi SIPT

b. Belum semua Rumah Sakit mengirimkan data SPIMKER secara periodic.

c. Belum menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik baik dengan Pusat maupun stake holder.

d. Dashboard belum digunakan secara maksimal untuk melakukan penelusuran.

Upaya yang dilakukan :

a. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu

b. Menghimbau Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER

c. Meningkatkan penggunaan email corporate dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stake holder.



Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional			-	-	
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BALAI BESAR POM DI SEMARANG yang optimal	2	hasil assesment oleh Pusdatin			0	0	

3.2.11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 44 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Terkelolanya Keuangan BBPOM Semarang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	50	38,42	77%	Cukup
	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91%	75%	82%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11					79,63%	Cukup

IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).



Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi			Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut			
27	Nilai Kinerja Anggaran BALAI BESAR POM DI SEMARANG	50	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)			38,42	77%	Cukup

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.

Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan anggaran belanja K/L saat ini serta sebagai bentuk relaksasi kebijakan penilaian IKPA belanja K/L tahun 2021 dalam rangka mendukung kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran K/L untuk percepatan penanganan Covid-19, maka Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021 pada Aplikasi OM-SPAN tidak dilakukan, penilaian IKPA akan dilakukan kembali mulai triwulan I. Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada Triwulan I tahun 2021 digunakan nilai IKPA 96,05.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang Triwulan I tahun 2021 belum keluar.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021



Mereview target triwulan berikutnya dan upaya untuk meningkatkan nilai IKPA maupun EKA.

- a. Untuk meningkatkan nilai Nilai IKPA:
 - Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
 - Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang
- b. Untuk meningkatkan nilai EKA :
 - Meminimalkan deviasi dari RPD di halaman III DIPA
 - Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19
 - Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
 - Meningkatkan capaian output kegiatan.

IKK.11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar

Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi				Realisas i TW I- 2021	% Capaian TW I	Kriteria
			Pembilang		Penyebut				
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BALAI BESAR POM DI SEMARANG	91%					75%	82%	Cukup

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada

persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D



- d. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

3.3 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang Triwulan I Tahun 2021 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 52.306.317.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus enam juta tiga ratus ribu tujuh belas ribu rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan I tahun 2021 terealisasi sebesar Rp7.398.450.720,- (Tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau 14.14% belum mencapai target 15%, karena masih terdapat beberapa berkas keuangan yang masih proses verifikasi.

Tabel 47 Realisasi Anggaran TW I

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25.669.714.000,00	1.922.585.174,00	
ADD	Standarisasi Lembaga	3.538.069.000,00	448.139.939,00	
ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3.538.069.000,00	448.139.939,00	12,67
AEA	Koordinasi	109.107.000,00	0,00	
AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	109.107.000,00	0,00	0,00
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.125.906.000,00	58.031.200,00	
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	1.125.906.000,00	58.031.200,00	5,15
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.150.000.000,00	241.871.050,00	
BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	6.150.000.000,00	241.871.050,00	3,93
BKB	Pemantauan produk	1.851.452.000,00	166.328.237,00	
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.851.452.000,00	166.328.237,00	8,98

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
BMB	Komunikasi Publik	124.000.000,00	49.500.000,00	
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	124.000.000,00	49.500.000,00	39,92
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	5.317.659.000,00	16.200.000,00	
CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3.302.659.000,00	16.200.000,00	0,49
CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	145.000.000,00	0,00	0,00
CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.870.000.000,00	0,00	0,00
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	1.106.748.000,00	218.745.512,00	
QCD.U05	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SEMARANG	1.106.748.000,00	218.745.512,00	19,76
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.964.211.000,00	222.692.800,00	
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	583.187.000,00	87.991.100,00	15,09
QDB.002	Desa Pangan Aman	1.043.468.000,00	76.526.800,00	7,33
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	337.556.000,00	58.174.900,00	17,23
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.965.200.000,00	186.134.036,00	
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	589.855.000,00	42.736.331,00	7,25
QIA005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1.316.341.000,00	128.084.955,00	9,73
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	59.004.000,00	15.312.750,00	25,95
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.417.362.000,00	314.942.400,00	
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	508.400.000,00	70.010.000,00	13,77
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1.908.962.000,00	244.932.400,00	12,83
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	26.636.603.000,00	5.475.865.546,00	
EAA	Layanan Perkantoran	26.636.603.000,00	5.475.865.546,00	
EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	26.636.603.000,00	5.475.865.546,00	20,56
TOTAL		52.306.317.000,00	7.398.450.720,00	14,14

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2021

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realization anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- b) Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- c) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- d) Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19.
- e) Percepatan pengadaan barang dan jasa.



Bab I Penutup

4.1 Kesimpulan

BBPOM di Semarang telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024, Tahun 2021 merupakan periode awal renstra 2020-2024. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan. Dan ini menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Semarang Tahun Anggaran 2021 yang memuat 11 Sasaran Kegiatan dan 27 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

No SS	Sasaran Strategis	% Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Semarang	103,75%	Baik
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM Semarang	79,12%	Cukup
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	64,56%	Kurang
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	129,44%	Tidak dapat disimpulkan
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	166,05%	Tidak dapat disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM Semarang secara Akuntabel	79,63%	Cukup

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 103,75% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil



mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2021

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 79,12%% dengan kriteria “cukup”, menunjukkan BBPOM di Semarang cukup mampu dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 64,56% dengan kriteria “kurang”, BBPOM di Semarang belum maksimal dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang karena beberapa tahapan tertunda dengan adanya kegiatan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat).
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 129,44%dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini menunjukkan penetapan target pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang terlalu rendah.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 166,05%dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini menunjukkan penetapan target penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang terlalu rendah.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 79,63% dengan kriteria “cukup”, menunjukkan BBPOM di Semarang cukup mampu dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

- a) Perlu perubahan target triwulanan untuk beberapa indikator.
- b) Perlu revisi Rencana Kegiatan untuk Triwulan II.



Lampiran





**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG**

NOMOR PR.04.01.104.11.20.3003 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Besar POM di Semarang pada
tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020

Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang

Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang
Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang
Nomor PR.04.01.104.11.20.3003 Tahun 2020 tentang
Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang
Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2021.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar POM di Semarang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 18 November 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



Gusti Ayu Adhi Aryapatni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.104.11.20.3003 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	92
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG

I Gusti Ayu Adhi Aryapatni



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Semarang, 21 Desember 2020



Pihak Pertama

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	92
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	82

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94.5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | Rp 25.669.714.000,- |
| 2 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp 26.636.603.000,- |

Semarang, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : likpomsm@yahoo.com - bpom_semarang @pom.go.id Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp 216.286.333,-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2	89.2	89.2	89.2	Rp 438.780.333,-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	Rp 216.286.333,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	Rp 6.105.000.000,-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,5	Rp 126.810.000,-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	Rp 24.240.000,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	89.5	Rp 301.955.000,-
4	Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/rekomendasi	89	89	89	89	Rp 353.579.000,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7	80.7	80.7	80.7	Rp 353.579.000,-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	Rp 395.186.000,-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	Rp 484.600.000,-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	Rp1.201.364.000,-
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	4.15	Rp. 301.955.000,-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90	90	90	Rp 169.000.000,-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35%	55%	65%	41	Rp 583.187.000,-
		Jumlah desa pangan aman	35%	50%	85%	19	Rp 1.043.468.000,-
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	50%	70%	10	Rp 337.556.000,-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	75	92.5	Rp 438.780.334,-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	80	90.5	Rp 216.286.334,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	72.5	Rp 1.215.855.000,-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	92	Rp 35.265.000,-
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	85	Rp 25.000.000,-
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	82	Rp 788.115.000,-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	77	Rp 8.855.728.000,-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2	2	2	2	Rp 6.280.000,-
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	50	65	75	94.5	Rp26.636.603.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Rp 996.792.000,-

Semarang, 21 Desember 2020
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG

Dra. I Gusti Ayu Ahi Aryapatni, Apt

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2021**

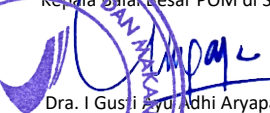
BB/BPOM	Sasaran Strategis		Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Definisi		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)			Capaian terhadap target TW (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)
						s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)			s,d TW I (Jan-Mar)				
						Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW I (Jan-Mar)				
Semarang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	284	305	93,11%	102,89%	102.89%
Semarang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	115	119	96,64%	120.80%	120.80%
Semarang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	89,20%	89,20%	89,20%	89,20%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	43	58	74,14%	83.11%	83.11%
Semarang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	37	45	82,22%	108.19%	108.19%
Semarang	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan	75	0	0	0	75	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	0	0
Semarang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	85,5	0	0	0	85,5	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	0	0
Semarang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73	0	0	0	73	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	0	0
Semarang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	0	0	0	89,5	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat		-	-	-	0	0

BB/BPOM	Sasaran Strategis		Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Definisi		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)			Capaian terhadap target TW (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)
						s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)	Pembilang	Penyebut	s,d TW I (Jan-Mar)			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW I (Jan-Mar)
												Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Semarang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	rata2 (%) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang rata2 (%)		7	7	100%	112,36%	112,36%
Semarang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	80,70%	80,70%	80,70%	80,70%	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s,d triwulan n		5	52	9,62%	11,91%	11,91%
Semarang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk	64	78	82.05%	86.37%	86.37%
Semarang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	51%	51%	51%	51%	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan	32	88	36.36%	71.30%	71.30%
Semarang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	57%	57%	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s,d	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s,d triwulan n	127	196	64.80%	113.68%	113.68%
Semarang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	14	Indeks Pelayanan Publik	4,15	0	0	0	4,15	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-		0	0.00%
Semarang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90%	90%	90%	90%	90%	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP		-	-		0.00%	0.00%

BB/BPOM	Sasaran Strategis		Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Definisi		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)			Capaian terhadap target TW (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)
						s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)	Pembilang	Penyebut	s,d TW I (Jan-Mar)			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW I (Jan-Mar)
												Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Semarang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	41	35%	55%	65%	41	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U)				19,27%	55,06%	19,27%
Semarang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	17	Jumlah desa pangan aman	19	35%	50%	85%	19	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U)				21,50%	61,43%	21,50%
Semarang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10	25%	50%	70%	10	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U)				19,30%	77,20%	19,30%
Semarang	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,50%	15,0%	30,0%	75,0%	92.5	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah target sampel	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel	-	-	22,28%	148,53%	22,28%
Semarang	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,50%	20,0%	35,0%	80,0%	90.5	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target	-	-	22,07%	110,35%	22,07%
Semarang	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,5%	20,0%	30,0%	50,0%	72,5%	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara		-	-	28,47%	166.04%	45.80%
Semarang	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB UPT	92	0	0	0	92	Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	0	0
Semarang	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	23	Nilai AKIP UPT	85	0	0	0	85	Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	0	0
Semarang	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82	0	0	0	82	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	0	0

BB/BPOM	Sasaran Strategis		Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				Definisi		Realisasi per Triwulan (Kumulatif)			Capaian terhadap target TW (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)
						s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW II (Jan-Jun)	s,d TW III (Jan-Sept)	s,d TW IV (Jan-Des)	Pembilang	Penyebut	s,d TW I (Jan-Mar)			s,d TW I (Jan-Mar)	s,d TW I (Jan-Mar)
												Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Semarang	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77%	0	0	0	77%	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian		-	-	-	0	0
Semarang	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2	2	2	2	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-		0.00%	0.00%
Semarang	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,5	50	60	75	94,5	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai		-	-	38,42	76,84%	40,66%
Semarang	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91	91	91	91	91			-	-	75	82,42%	82,42%

Semarang, 9 April 2021
Kepala Balai Besar POM di Semarang


Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt



Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Semarang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	93,11%	102,89%	Baik
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	96,64%	120,80%	Tidak dapat disimpulkan
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	74,14%	83,11%	Cukup
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	82,22%	108,19%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1					103,75%	Baik
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2					0,00%	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM Semarang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0		0,00%	
	7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0		0,00%	
	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3					0,00%	
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM Semarang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100,00%	112,36%	Sangat Baik
	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	9,62%	11,91%	Sangat kurang
	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	82,05%	86,37%	Cukup
	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	36,36%	71,29%	Cukup
	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	64,80%	113,68%	Sangat Baik
	14	Indeks Pelayanan Publik	0	0	0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4					79,12%	Cukup
Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00%		0,00%	
	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35,00%	19,27%	55,06%	Kurang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW I	Realisasi TW I-2021	% Capaian TW I	Kriteria
kerja BBPOM Semarang	17	Jumlah desa pangan aman	35,00%	21,50%	61,43%	Kurang
	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00%	19,30%	77,20%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5					64,56%	Kurang
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00%	22,28%	148,53%	Tidak dapat disimpulkan
	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00%	22,07%	110,35%	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6					129,44%	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	33,21%	166,05%	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7					166,05%	Tidak dapat disimpulkan
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM Semarang yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Semarang	0		0,00%	
	23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8					0,00%	
Terwujudnya SDM BBPOM Semarang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	0		0,00%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9					0,00%	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0		0,00%	
	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2		0	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10					0,00%	
Terkelolanya Keuangan BBPOM Semarang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	50	38,42	77%	Cukup
	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	91%	75%	82%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11					79,63%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					83,60%	Cukup

Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja TW I Tahun 2021 BBPOM di Semarang

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	93,11%	102,89	438.780.333	42.694.985	9,73	10,57	9,57	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	96,64%	120,80	216.286.333	19.349.694	8,95	13,50	12,50	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	74,14%	83,11	438.780.333	42.694.985	9,73	8,54	1,80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	82%	108,19	216.286.333	19.349.694	8,95	12,09	11,09	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100%	112,36	353.579.000	73.522.500	20,79	5,40	4,40	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	9,62%	11,91	353.579.000	73.522.500	20,79	0,57	-0,43	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	82,05%	86,37	395.186.000	48.589.700	12,30	7,02	6,02	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	36,36%	71,29	484.600.000	70.010.000	14,45	4,93	3,93	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	64,80%	113,68	1.201.364.000	97.887.400	8,15	13,95	12,95	75 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-		0,00	169.000.000	49.500.000	29,29	0,00	-1,00	75 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35%	19%	55,06	583.187.000	87.991.100	15,09	3,65	2,65	75 %
17	Jumlah desa pangan aman	35%	22%	61,43	1.043.468.000	76.526.800	7,33	8,38	7,38	75 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	19%	77,20	337.556.000	58.174.900	17,23	4,48	3,48	75 %
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,0%	22,28%	148,53	438.780.333	42.694.985	9,73	15,26	14,26	75 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,0%	22,07%	110,35	216.286.334	19.349.694	8,95	12,33	11,33	75 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,0%	28,47%	142,35	1.215.855.000	218.745.512	17,99	7,91	6,91	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	0	0,00	6.280.000	-	0,00	0,00	-1,00	75 %
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	38,42	76,84	26.636.603.000	5.475.865.546	20,56	3,74	2,74	75 %
	TOTAL			82,35	34.745.457.000	6.516.469.994	18,75	4,39	3,39	75 %